

## REPRODUKSI ELIT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONE DAN GOWA

Oleh: Imam Mujahidin Fahmid,  
Arya Hadi Dharmawan, Lala. M. Kolopaking, Darmawan Salman\*

### ABSTRACT

*This study aims to describe the response of ethnic political subculture Bugis Bone and Gowa Makassar in the reform era, especially in the formation of a new elite. The results of this study indicate that the model of ethnic identity politics in Bugis Bone strengthened and weakened in Gowa Makassar ethnicity. Bone aristocrat succes to maintain its relationship with the masses, rather Gowa aristocrat, was decreased political function. In Bone, there was an elite formation process that is conducted by the clan of Page, while the political stage in Gowa more open and filled by a diverse political community. Bone society's political choices are more primordial, caused by power relations that continue to be maintained by the nobility of Bone. While the diversity of political choices made by people of Gowa due to the weak political control by elites and Gowa aristocrat.*

*Key Words: Local elite, politics, autonomy.*

### Pendahuluan

Pola pembentukan elit pada setiap rezim selalu mengalami perubahan, baik perubahan pada proses pembentukannya, maupun perubahan pada formasi dan struktur kelompok elit. Perubahan-perubahan ini kadangkala disertai dengan kompetisi yang sangat ketat yang berujung pada konflik sosial. Dalam kompetisi merebut panggung kekuasaan tersebut, para elit sering memanfaatkan isu-isu primordial yang berbasis etnisitas sebagai alat tunggangannya. Pemanfaatan isu etnisitas ini jikalau tidak dikontrol akan menimbulkan persoalan sosial yang rumit.

Isu etnisitas juga telah melahirkan pola politik yang beragam yang ditonjolkan

oleh setiap sub-kultur politik. Pola politik etnis Bugis kabupaten Bone berbeda caranya merespon proses pembentukan elit pada era otonomi daerah dengan etnis Makassar kabupten Gowa.

Perbedaan respon ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal seperti; kemampuan elit lama; aristokrat dan para bangsawan merawat dan memperluas kekuasaannya, dan daya tahan calon elit baru melakukan perombakan struktur kekuasaan melalui berbagai cara. Selain itu, masuknya konsep demokrasi global juga mewarnai perubahan sistem politik pada sub-kultur politik Kabupaten Bone dan Gowa.

\*Berturut-turut 1). Mahasiswa Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB Angkatan 2007, 2). Ketua Komisi Pembimbing, Dosen Departemen KPM FEMA IPB, 3). Anggota Komisi Pembimbing, Dosen Departemen KPM FEMA IPB, 4). Anggota Komisi Pembimbing, Dosen FAPERTA UNHAS.

Penelitian ini ingin melihat respon etnis Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa dalam proses pembentukan elit dan bagaimana dua subkultur politik tersebut melakukan reproduksi elit, terutama pada era otonomi daerah. Merujuk pada tujuan penelitian tersebut, lokasi penelitian adalah Kabupaten Bone dan Gowa pada aras mezo, sedangkan pada mikro dipilih masing-masing dua desa pada Kabupaten Gowa dan Bone. Sedangkan Propinsi Sulawesi Selatan mewakili aras makro. Pengamatan terutama dilakukan pada aktor-aktor elit yang mengisi panggung kekuasaan pada masing-masing kabupaten dan bagaimana komunitas pada kabupaten tersebut, memberikan dukungan politik atau mereduksi dukungannya terhadap elit-elit tertentu.

### **Respon Politik Etnis Bugis Bone dan Makassar Gowa**

Proses pembentukan elit pada era otonomi daerah sesuai amanat UU 32 tahun 2004 di Kabupaten Bone dan Gowa tidak bisa dilepaskan dengan proses pembentukan elit pada masa sebelumnya yakni; Aristokrasi, Kolonialisme, Orde Lama, dan Orde Baru. Mayoritas elit-elit yang ada saat ini baik yang berada di panggung kekuasaan politik di Kabupaten Bone dan Gowa, maupun elit yang berasal dari

Kabupaten Bone dan Gowa yang berkiprah di panggung politik pada level provinsi dan nasional, proses kelahirannya sulit tidak dikaitkan dengan era politik sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa nama elit baru, baik dari Kabupaten Bone maupun Kabupaten Gowa yang tidak memiliki hubungan sejarah dengan era politik sebelum otonomi daerah.

Beberapa elit yang diproduksi oleh otonomi daerah berdasarkan UU 32 tahun 2004 antara lain dari Bone adalah Anis Matta (Sekjen PKS, Wakil Ketua DPR RI), Akmal Pasluddin (Ketua PKS Sulsel, dan wakil ketua DPRD Sulsel), AM Fatwa (Anggota DPD RI). Sedangkan dari Kabupaten Gowa terdapat nama-nama antara lain Amir Uskara (Ketua PPP Sulsel, dan anggota DPRD Sulsel), dan Hasrullah (mantan anggota DPRD Sulsel). Nama-nama ini lahir sebagai elit baru melalui rahim reformasi, dan menjadikan partai politik sebagai tunggangan untuk memasuki panggung kekuasaan.

Sedangkan elit-elit yang masih bertahan, dan memiliki hubungan dengan rezim sebelumnya adalah; keluarga Yasin Limpo dan Ryas Rasyid di Gowa, dan keluarga besar Arung Tarassu, Jusuf Kalla, Nurdin Halid di Bone.

Melalui UU 32 tahun 2004, diberikan kesempatan yang sama kepada

semua komponen masyarakat untuk berkompetisi merebut panggung politik, akan tetapi kelonggaran panggung politik tidak serta merta diikuti oleh institusi negara yang lain. Birokrasi pemerintah misalnya masih mempertahankan tradisinya dalam hal menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan-jabatan strategis, terutama eselon dua dan tiga.

Di Kabupaten Bone misalnya, kekuatan aristokrasi dan sentimen kedaerahan menjadi penentu yang cukup berpengaruh dalam memilih calon-calon pejabat eselon dua dan tiga. Sangat terbatas jumlah pejabat eselon dua dan tiga di Kabupaten Bone yang tidak bergelar "andi," dan hampir semua pejabat adalah putra asli Bone. Gelar "andi" adalah salah satu varian yang dapat dipakai untuk menentukan posisi kebangsawanan seseorang di Kabupaten Bone. Kondisi ini menunjukkan kuatnya peranan aristokrasi mempertahankan dirinya dalam struktur kekuasaan di Bone.

Sebaliknya, ruang kekuasaan yang disajikan di atas panggung birokrasi Kabupaten Gowa jauh lebih "fleksibel" dibandingkan dengan Kabupaten Bone. Jabatan-jabatan strategis pada eselon dua dan tiga diisi oleh beragam suku dan etnis, dan dari berbagai latar belakang keturunan. Kecenderungan ini dapat dibaca bahwa di

Kabupaten Gowa, sentimen kesukuan dan status kebangsawanan tidak ikut berpengaruh dalam memposisikan pejabat eselon dua dan tiga. Fakta ini bisa dimaknai sebagai pertanda tumbuhnya birokrasi rasional. Penjelasan lain adalah, terputusnya relasi antara kekuasaan birokrasi saat ini dengan kekuasaan sebelumnya, terutama dengan kalangan penguasa yang berdarah aristokrat.

Selain melalui panggung politik dan birokrasi, dua jalur yang selama ini – sejak fase tradisional, hingga fase reformasi atau otonomi daerah,- masih dalam penguasaan dan kontrol kalangan bangsawan, reproduksi elit di Bone juga dilakukan dengan cara lain yakni; "perlawanan dari belakang" yang dilakukan oleh Klan Page. Kalangan aristokrat menyebut perlawanan ini sebagai pembangkangan sosial dan kultural. Melalui sejumlah aktivitas perampokan, perjudian dan penekanan-penekanan kepada terutama masyarakat pedesaan sejak tahun 1970-an, Klan Page berhasil diidentifikasi sebagai kekuatan baru yang mengancam kewibawaan kalangan aristokrat yang menduduki panggung kekuasaan formal yakni; eksekutif dan legislatif. Puncaknya, memasuki era otonomi daerah, Klan Page menembus arena kekuasaan formal di berbagai level; dari desa hingga propinsi di

hampir semua Jazirah Sulawesi. Klan Page melakukan aktivitas politiknya dimulai dari desa Benteng Tellue Kecamatan Amali.

”Perlawanan dari belakang” yang dilakukan oleh klan Page terhadap panggung kekuasaan di Kabupaten Bone menunjukkan ketatnya kontrol kalangan bangsawan terhadap struktur kekuasaan di Bone. Perawatan kekuasaan yang dimainkan oleh kelompok aristokrat menyulitkan kalangan lain menembus arena kekuasaan di Bone. Itu sebabnya, Klan Page menerobosnya dengan cara yang tidak lumrah atau dianggap sebagai cara yang menyimpang secara sosial dan kultural. Tapi cara ini ternyata membuahkan hasil dalam mereproduksi elit-elit baru di Kabupaten Bone. Kata kunci dari keberhasilan Klan Page menerobos panggung kekuasaan Bone, bukan semata karena keberhasilannya membuat jalan baru untuk mereproduksi elit, akan tetapi faktor regulasi otonomi daerah melalui UU 32 tahun 2004 melengkapi langkah yang dibangun oleh Klan Page memasuki arena kekuasaan formal di Kabupaten Bone.

Cara ”menyimpang” yang dilakukan oleh Klan Page di Kabupaten Bone, tidak terjadi pada panggung kekuasaan di Kabupaten Gowa. Reproduksi elit yang terjadi di Gowa pada era otonomi daerah berlangsung lebih terbuka, melibatkan

semua kalangan yang memiliki hak dengan syarat-syarat yang ditentukan secara demokratis. ”Perlawanan dari belakang” seperti yang terjadi di Bone tidak diperlukan oleh masyarakat di Gowa. Karena elit Gowa, termasuk didalamnya kaum aristokrat tidak mengontrol struktur kekuasaan secara ketat, sehingga menutup pintu bagi calon-calon elit baru. Pemain-pemain baru yang ingin menembus panggung kekuasaan di Gowa tidak memerlukan ”jalan lain” untuk dilewati.

Ada beberapa asumsi yang bisa dikembangkan dari lemahnya kontrol elit Gowa, terutama kaum aristokrat terhadap ruang struktur kekuasaan di Gowa. *Pertama*, kelemahan kontrol itu disebabkan karena menguatnya perlawanan massa terhadap dominasi kelompok elit atau kalangan bangsawan pada ruang kekuasaan, atau terjadi kemerosotan peranan elit dan aristokrat, akibat tekanan publik dan perubahan sistem politik. *Kedua*, meningkatnya kesadaran para elit terhadap perubahan pola dan struktur kekuasaan, sehingga memberikan ruang terbuka bagi berkembangnya elit-elit baru memasuki struktur kekuasaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Gowa terjadi penyatuan kesadaran elit dengan meningkatnya pemahaman massa akan hak-hak politiknya,

menyebabkan terbukanya struktur kekuasaan bagi semua pihak. Sementara di Kabupaten Bone, para elit, terutama dari kalangan aristokrat menempatkan struktur kekuasaan pada ruang terbatas, yang masih sulit diakses oleh masyarakat umum. Bersamaan dengan berkembangnya kultur politik inklusif para elit, masyarakat sipilnya (*civil society*) tidak melakukan semacam "perlawanan" atau "tekanan," secara massif meskipun mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik tentang hak-hak dan kewajiban politik mereka. Kehidupan masyarakat sipil di Bone sudah sangat terbuka, akan tetapi ideologi dan karakter politik mereka belum bergeser, masih tunduk pada para elit. Dalam arena kekuasaan, elit aristokrat berhasil menciptakan komunitas mereka sebagai patron bagi masyarakat kebanyakan. Kecekatan elit Bone gagal diikuti oleh elit dan bangsawan Gowa.

Perbedaan di dalam mereproduksi elit antara etnis Bugis Bone dengan etnis Makassar Gowa dapat diteropong lebih tajam pada kasus penentuan elit atau

pemimpin yang melibatkan partisipasi politik masyarakat. Apakah kekuatan kalangan aristokrasi pada etnis Bugis Bone merawat kekuasaannya dapat dibuktikan melalui persetujuan dan ketaatan politik dari masyarakat melalui pemilu? Sebaliknya apakah ruang politik dan kekuasaan yang sudah terbuka di Kabupaten Gowa sinkron dengan kesadaran rasional yang dimiliki oleh masyarakatnya melalui pemilu?

Beberapa kasus di bawah ini dapat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang preferensi masing-masing masyarakat; Bone dan Gowa terhadap kekuasaan. Bagaimana elit-elit etnis Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa direproduksi dengan caranya masing-masing. Pada kasus-kasus berikut ini akan memperlihatkan bagaimana kekentalan primordial dalam menentukan pilihan politik terhadap patronnya, terjadi dengan jelas di Bone. Sebaliknya pilihan politik publik Gowa sangat beragam, tidak tergantung pada patron elit.

**Tabel 1. Pertarungan Elit Partai Golkar pada pemilu 2004 untuk kursi DPR RI Dapil I, membandingkan elit etnis Bugis Bone dengan elit etnis Makassar Gowa**

No Calon	Nama Calon	Jml Suara	%Suara Partai
6	Drs. H.A.M. Nurdin Halid (Bone)	95.95	10.4
1	Andi Mattalatta, SH, MH (Bone)	94.611	10.3
14	Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung (Gowa)	68.062	7.4

2	Prof. Dr. H. Anwar Arifin	53.47	5.8
5	Nurhayati Yasin Limpo (Gowa)	49.352	5.4
3	H. Hamka Yandhu Y.R, SE	42.508	4.6
7	Drs. H. Ibrahim Ambong	36.843	4
4	Idrus Marham	33.759	3.7
8	Drs. H. Hakamuddin Djamal	26.186	2.8
11	Drs. H. Sirajuddin Sewang	25.988	2.8
10	Drs. H. Ibnu Munzir	20.29	2.2
9	Natsir Mansyur, SE	19.622	2.1
12	Drg. Fadillah Ram, M.Kes	12.144	1.3
13	Nur Syamsina Aroepalla	5.844	0.6

Pada tabel di atas, Partai Golkar mencalonkan 14 orang kandidat untuk DPR RI daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi daerah kabupaten/kota; Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone, Soppeng dan Wajo. Dari Kabupaten Bone terdapat dua kandidat; Andi Mattalatta (Urut 1) dengan Nurdin Halid (Urut 6). Kabupaten Gowa menyiapkan dua nama; Nurhayati Yasin Limpo (urut 5) dan Sjahrir S. Dg Djarung (urut 14). Suara tertinggi dari Kabupaten Bone diraih oleh Nurdin Halid, disusul Andi Mattallata. Akan tetapi Nurdin Halid tidak bisa duduk di DPR RI karena masih menggunakan sistem nomor urut. Andi Mattalatta duduk di DPR RI mewakili Sulsel dapil I, sekaligus mewakili Bone.

Hal yang sama terjadi pada etnis Makassar Kabupaten Gowa. Suara tertinggi dari Gowa justru diperoleh Sjahrir Dg Jarung, namun yang duduk mewakili Sulsel dari dapil I, sekaligus representasi dari

Gowa adalah Nurhayati Yasin Limpo. Andi Mattalatta adalah golongan aristokrat yang terus bertahan pada panggung kekuasaan sampai era otonomi daerah. Sedangkan Nurhayati Yasin Limpo adalah istri Yasin Limpo yang memiliki peranan kekuasaan politik di Gowa sejak Orde Baru hingga masa otonomi daerah.

Lebih dari 65% perolehan suara Nurdin Halid dan Andi Mattalatta (hal yang sama juga dicapai oleh Hamka Yandu, lihat tabel 1 ), dikumpulkan dari kabupaten Bone, sepuluh daerah lain yang menjadi bagian daerah pemilihan wilayah I hanya memberikan kontribusi suara kurang 35%. Sedangkan Nurhayati Yasin Limpo dan Sjahrir Dg Jarung mengumpulkan suara di kabupaten Gowa kurang dari 35%. Sepuluh daerah lain menyumbangkan suara kepada orang Gowa ini sekitar 65% suara. Data ini menjelaskan bahwa etnis Bugis Bone memiliki tingkat primordialisme dan issue

kedaerahn yang relatif tinggi, dibandingkan

dengan etnis Makassar Gowa.

**Tabel 2. Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Bone pemilu 2009, Dapil DPR RI Sulsel II**

DPR RI 2009	Bulu-kumba	Sinjai	Bone	Maros	Pangkep	Baru	Soppeng	Wajo	Parepare	Total
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.KN	6563	1399	48128	1817	978	1276	956	2744	680	64541
	10.17 %	2.17 %	74.57 %	2.82 %	1.52 %	1.98 %	1.48 %	4.25 %	1.05 %	100.00 %

**Tabel 3. Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Gowa pemilu 2009, Dapil DPR RI Sulsel I**

DPR RI 2009	Kep. Selayar	Bantaeng	Jenepono	Takalar	Gowa	Makassar	Total
INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL. SE., MM.	1232	916	3812	1268	12132	16337	35697
	3.45 %	2.57 %	10.68 %	3.55 %	33.99 %	45.77 %	100.00 %

Andi Rio Idris Padjalangi yang terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2009 adalah keturunan bangsawan Bone, sekaligus anak mantu mantan menteri Hukum dan HAM, A. Mattalatta, dan keponakan Bupati Bone A. Idris Galigo. Ia meraih suara sebanyak 64.541 dari daerah pemilihan (dapil) II yang meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Pare-Pare, Maros, Pangkep dan Maros (lihat tabel 2). Kabupaten Bone menyumbangkan suara sebanyak 74,57%. Itu berarti hanya 25,53% suara yang diperoleh dari delapan

kabupaten lainnya. Bandingkan dengan perolehan suara yang dicapai oleh Indira Chunda Thita Syahrul, anggota DPR RI dari dapil I adalah elit dari Gowa, putri sulung Gubernur Sulsel, keponakan Bupati Gowa dan cucu Yasin Limpo. Dukungan yang diperoleh dari daerah basisnya (Gowa) hanya 33,99%. Thita justru memperoleh suara terbanyak dari daerah "terbuka" Makassar, daerah yang menjadi rebutan semua calon legislatif. Sedangkan daerah lain; Takallar, Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar, berkisar antara 3-10% (lihat tabel 3). Meskipun Thita memili

struktur kekuasaan yang kuat di daerah basisnya (Gowa), akan tetapi dukungan suara tidak mayoritas dari Gowa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Andi Rio Padjalangi di Bone.

Kecenderungan dukungan masyarakat basis yang berbeda antara Kabupaten Bone dan Gowa juga terlihat pada tabel; 4, dimana Andi Irsan Idris Galigo (putra Bupati Bone) yang terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel pada pemilu 2009 mewakili dapil 5 (Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo), mendapatkan dukungan suara dominan dari Kabupaten Bone sebesar 97,78% dari total suara sebanyak 83.334. Dua kabupaten lainnya hanya menyumbangkan suara sebesar 2,32% (lihat tabel 4). Hal yang kontras terjadi di Kabupaten Gowa. Dukungan suara yang

diraih oleh Tenri Olle Yasin Limpo (Kakak Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel), memperoleh suara yang cukup signifikan dari daerah lain; Takalar dan Jeneponto yakni 32,84%.

Meskipun kabupaten Gowa masih memberikan kontribusi terbesar yakni 77,16%, akan tetapi elit Gowa (Nurhayati Yasin Limpo, Thita Syahrul dan Tenri Olle YL) mendapatkan dukungan yang cukup baik dari etnis Makassar di luar Kabupaten Gowa. Hal seperti ini tidak terjadi pada elit Bugis Bone (Andi Mattalata, A. Rio Padjalangi, dan Andi Irsan Idris Galigo). Dukungan yang signifikan etnis Bugis di luar Kabupaten Bone terhadap elit Bone pada kasus ini tidak terjadi. Dukungan etnis Bugis Bone hanya diperuntukkan bagi elit yang berasal dari Bone.

**Tabel 4: Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Bone pemilu 2009, DPRD Sulsel dapil V**

DPRD 1 2009	Bone	Soppeng	Wajo	Total
H.A.MUH. IRSAN IDRIS GALIGO, ST.,MM	82315	275	744	83334
	98.78%	0.33%	0.89%	100.00%

**Tabel 5. Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Gowa pemilu 2009, DPRD Sulsel dapil II**



DPRD 1 2009	Gowa	Takalar	Jenepono	Total
Hj.TENRI OLLE YASIN LIMPO	32715	5289	4395	42399
	77.16%	12.47%	10.37%	100.00%

### Beberapa Perbedaan

Data di atas menggambarkan proses reproduksi elit antara subkultur Bone dengan subkultur Gowa memiliki perbedaan yang cukup jelas. Letak perbedaan yang paling menonjol terdapat pada preferensi masyarakat yang “tertutup” dan “terbuka” dalam menentukan pemimpin. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Rakyat adalah yang berdaulat, dengan mekanisme yang menunjukkan kedaulatan itu, yang diwujudkan melalui perwakilan. Proses itu berjalan secara terbuka dan menjamin hak setiap warga untuk turut serta di dalamnya, dengan demikian dilengkapi oleh mekanisme komunikasi sosial yang efektif. Penguasa tunduk kepada kedaulatan rakyat dan hukum, seperti juga semua warga negara. Penyelenggara negara terbentuk tidak atas dasar keturunan, ras, agama, kesetiaan perorangan, tetapi atas dasar kecakapan, integritas, dan kesetiaan kepada tugas dan tujuan organisasi.

Masyarakat yang dianggap “tertutup” dalam penelitian ini, berdasarkan

data di atas terjadi pada proses reproduksi elit etnis Bugis di Kabupaten Bone. Masyarakat tertutup biasanya melekat dengan isu-isu kedaerahan, primordial dan sektarian. Dalam konteks ini, masyarakat yang “tertutup” akan mengalami benturan ideology (Huntington 1993). Ideologi lokal yang cenderung bersifat primordial dan sektarian akan berhadapan dengan ideologi global yang mengusung konsep rasional, egaliter, dan kesetaraan akan hak dan kewajiban. Ideologi terakhir ini dikenal sebagai ideologi demokrasi.

Proses reproduksi elit di dalam subkultur etnis Makassar Gowa, pada era otonomi daerah, relatif berbeda dengan yang terjadi pada etnis Bugis Bone. Perbedaannya paling tidak terlihat pada kemampuan politik masyarakat Gowa yang memiliki pilihan politik yang lebih luas dan beragam. Pilihan politiknya tidak terkonsentrasi pada struktur kekuasaan yang ada di Kabupaten Gowa. Keadaan ini bisa dimaknai sebagai kuatnya kesadaran politik rasional pada masyarakat Gowa, atau

melemahnya kontrol struktur kekuasaan yang ada di sana. Atau, struktur kekuasaan di Gowa justru memiliki kemauan politik untuk mendorong masyarakatnya menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran politik rasional.

Akan tetapi, jika dicocokkan dengan kriteria elit yang diinginkan oleh masyarakat politik di Gowa, bahwa seorang elit itu harus memenuhi syarat antara lain; kecakapan atau kemampuan (*competency* atau *capacity*) yang berarti harus memiliki pendidikan yang memadai dan pengalaman baik (*track record*), maka pilihan politik

mereka bisa dikategorikan sebagai pilihan politik rasional dan terbuka. Dengan demikian, dalam proses mereproduksi elit, ideologi politik pada subkultur politik Gowa tidak berbenturan dengan ideologi global yang bernama demokrasi.

Berdasarkan kecenderungan politik etnis Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa yang telah diuraikan di atas, maka varian yang ikut berpengaruh dalam proses reproduksi elit Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa pada era otonomi dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

**Tabel;6 Reproduksi Elit antara Etnis Bugis Bone dengan etnis Makassar Gowa**

No	Faktor yang mempengaruhi reproduksi elit pada etnis Bugis Bone dan elit etnis Makassar Gowa pada era otonomi daerah	
	Bone	Gowa
1	Latar belakang keluarga atau keturunan adalah hal utama	Tidak mempersoalkan latar belakang dan keturunan
2	Issue primordial, sektarian dan etnisitas kedaerahan adalah issue pokok	Dapat menerima semua kelompok social, lebih fleksibel dalam issue primordial
3	Pendidikan, pengalaman, <i>competency</i> dan <i>capacity</i>	Pendidikan, pengalaman, <i>competency</i> , dan <i>capacity</i>
4	Uang (materi)	Uang (materi)
5	<i>Track record</i> bukan soal utama	<i>Track record</i> merupakan soal penting
6	Simbol-simbol budaya masih kuat berperan	Simbol budaya mengalami penurunan fungsi

Melihat faktor yang berpengaruh pada reproduksi elit etnis Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa pada era otonomi daerah pada tabel di atas, nampak jelas keberadaan elit di Kabupaten Bone saat ini

tidak bisa dipisahkan dengan pengaruh para elit pada fase-fase sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa elit dari Kabupaten Bone hari ini (era otonomi daerah) sebagian besar adalah elit warisan masa lalu. Sedangkan

elit Gowa pada saat sekarang, merupakan elit yang tumbuh paling lama pada masa Orde Baru. Elit lama yang berkuasa pada fase tradisional, feodalisme dan fase Islam modernisme, gagal mempertahankan dan memelihara eksistensinya. Sebagian besar elit Gowa saat ini telah berhasil memotong mata rantai kekuasaan elit lama, dan kini mereka tumbuh sebagai kekuatan baru yang hampir tidak memiliki hubungan dengan elit-elit masa lampau.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan dalam reproduksi elit di Kabupaten Bone dan Gowa selama era otonomi daerah. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melingkupinya, mulai dari tradisi, kultur, sifat dan watak masyarakat setempat, kedalaman pengaruh elite di masing-masing daerah. Baik di Bone maupun di Gowa, struktur dan kedudukan elit mengalami tantangan dengan intensitas yang berbeda, sehingga melahirkan suatu barisan elite baru dengan corak yang berbeda pula. Sementara di Kabupaten Bone sekarang ini, sebagian besar elit yang muncul adalah tetap elit warisan masa lalu. Sementara di Kabupaten di Gowa, elit yang muncul merupakan elit yang tumbuh agak belakangan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Gowa terjadi penyatuan kesadaran elit dengan meningkatnya pemahaman massa akan hak-hak politiknya, menyebabkan terbukanya struktur kekuasaan bagi semua pihak. Sementara di Kabupaten Bone, para elit, terutama dari kalangan aristokrat menempatkan struktur kekuasaan pada ruang terbatas, yang masih sulit diakses oleh masyarakat umum. Bersamaan dengan berkembangnya kultur politik inklusif para elit, masyarakat sipilnya (*civil society*) tidak melakukan semacam "perlawanan" atau "tekanan," secara massif meskipun mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik tentang hak-hak dan kewajiban politik mereka. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa mayoritas elit-elit yang ada saat ini, baik yang berada di panggung kekuasaan politik di Kabupaten Bone dan Gowa, yang berkiprah di panggung politik pada level propinsi dan nasional, proses kelahirannya tidak dapat dipisahkan dari era politik sebelumnya, yakni Orde Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

Hardiman, Franciskus Budi, *Melampaui Positivism dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

*Harian Tribun Timur*, Tanggal 9 Mei 2007.

Huntington, Samuel, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster, 1997.

Kung, Hans, *A Global Ethics for Global Politics and Economics*, SCM Press, 1997.

Limpo, Syahrul Yasin, *Jangan Marah di Muara*, Makassar: Citra Pustaka, 2005.

Ohmae, Kenichi, *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*, New York: Simon and Schuster Inc., 1995.